

BAB I

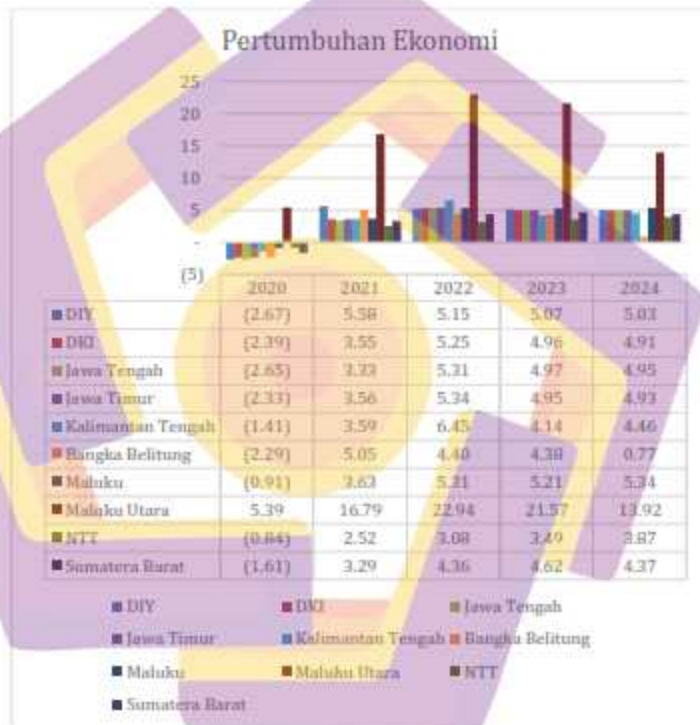
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan tujuan utama pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik dalam lingkungan masyarakat. Menurut Todaro, pembangunan ekonomi adalah sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan (Todaro, 2021). Pembangunan manusia merupakan proses agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Proses pembangunan tersebut meliputi berbagai perubahan pada aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, pembangunan merupakan syarat mutlak bagi keberlangsungan suatu negara.

Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Salah satu indikator terpenting yang menggambarkan keberhasilan pembangunan ekonomi yaitu peningkatan pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan, menanggulangi ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sasaran

dalam pembangunan bagi negara berkembang, pembangunan manusia ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi (Dewi., 2021). Pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan merupakan prasyarat mutlak untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang tersaji dalam tabel berikut.



Grafik 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi (persen)

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2026)

Berdasarkan data grafik, pertumbuhan ekonomi menunjukkan kondisi yang bervariasi. Provinsi Maluku Utara mencatat capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pada tahun 2020 sebesar 5,39% dan tahun 2022 sebesar

22,94% jauh diatas dari provinsi yang lainnya. Sedangkan Yogyakarta pada tahun 2020 memiliki nilai yang terendah yaitu sebesar -2,67%. Penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 disebabkan oleh fenomena COVID-19 yang secara langsung mengancam ketahanan pangan masyarakat, yang dimana jika pendapatan menurun akan mengakibatkan penurunan daya beli dan konsumsi masyarakat.

Pandemi COVID-19 pada periode 2020-2022 memberikan tekanan yang besar terhadap ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah yang berdampak pada seluruh rantai pasok pangan mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi karena adanya pembatasan mobilitas, penutupan akses transportasi, serta keterbatasan tenaga kerja di sektor pertanian. Dengan kondisi tersebut menjadikan kenaikan harga, distribusi pangan tidak merata dan ketersediaan bahan pangan di beberapa wilayah juga terganggu. Selain itu, penurunan daya beli masyarakat menyebabkan konsumsi pangan menurun, terutama di kalangan rumah tangga berpendapatan rendah. Hal ini memperburuk kerentanan pangan dan menurunkan tingkat kesejahteraan petani akibat turunnya harga komoditas dan permintaan pasar. Namun, pasca-pandemi, sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang paling cepat pulih dan berperan penting dalam pemulihan ekonomi daerah melalui peningkatan produksi pangan dan penyerapan tenaga kerja (Nurhidayah, 2026) .

Pencapaian pembangunan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari kondisi ketahanan pangan suatu wilayah. Ketahanan pangan saat ini sudah menjadi isu global yang mendapat perhatian signifikan karena perkembangan global yang

mengancam stabilitas pasokan pangan, seperti perubahan iklim, pandemi, dan konflik geopolitik. Secara global, ketahanan pangan dikenal sebagai salah satu hak asasi manusia yang menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan internasional. Ini terus menjadi salah satu isu yang terus disoroti oleh lembaga-lembaga internasional. Bahkan, ketahanan pangan menjadi salah satu agenda prioritas dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2015 yang memberikan panduan terperinci mengenai langkah-langkah yang perlu diambil dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang inklusif, adil, dan ramah lingkungan di seluruh dunia (Olajide., 2025).

SDGs sendiri terdiri dari 17 tujuan yang mencakup berbagai aspek kehidupan, dimulai dari pengentasan kemiskinan hingga penguatan perdamaian, keadilan, dan institusi. Setiap tujuan dilengkapi dengan indikator yang difungsikan untuk memantau kemajuan di berbagai negara, dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan organisasi internasional sebagai kunci keberhasilan implementasinya (United Nations, 2022). Pada penelitian ini, SDGs yang saling terkait yaitu SDG-2 (*Zero Hunger*), SDG-1 (*No Poverty*), SDG-8 (*Decent work and economic growth*), dan SDG-10 (*Reduced Inequalities*).



Gambar 1. 1 SDGs

Sumber : (United Nations, 2022)

Kesejahteraan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan variabel PDRB per kapita dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan SDG-10 Berkurangnya Ketimpangan (*Reduced Inequalities*) yang berfokus pada pengurangan ketimpangan pendapatan dan antar wilayah, baik di dalam maupun antar negara. Ketimpangan yang tinggi berkorelasi erat dengan kerawanan pangan, karena kelompok berpendapatan rendah lebih rentan terhadap guncangan harga pangan global (Hendriks, 2024).

Penelitian ini berfokus pada penerapan SDGs secara khusus tertuju pada SDG-2 Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*), yang menegaskan ketahanan pangan sebagai tujuan utama untuk mengakhiri kelaparan, memperbaiki status gizi masyarakat, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan dan inklusif (*Food and Agriculture Organization*, 2022). Komitmen tersebut diwujudkan melalui ketersediaan dan aksesibilitas atas pangan yang sehat, cukup, dan bergizi seimbang bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dalam penelitian ini, kualitas konsumsi yang diprosikan dengan Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi indikator penting untuk menilai kualitas konsumsi pangan masyarakat. Semakin tinggi nilai PPH, maka semakin baik

keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan suatu wilayah, sehingga dapat mencerminkan kondisi pangan yang lebih baik.

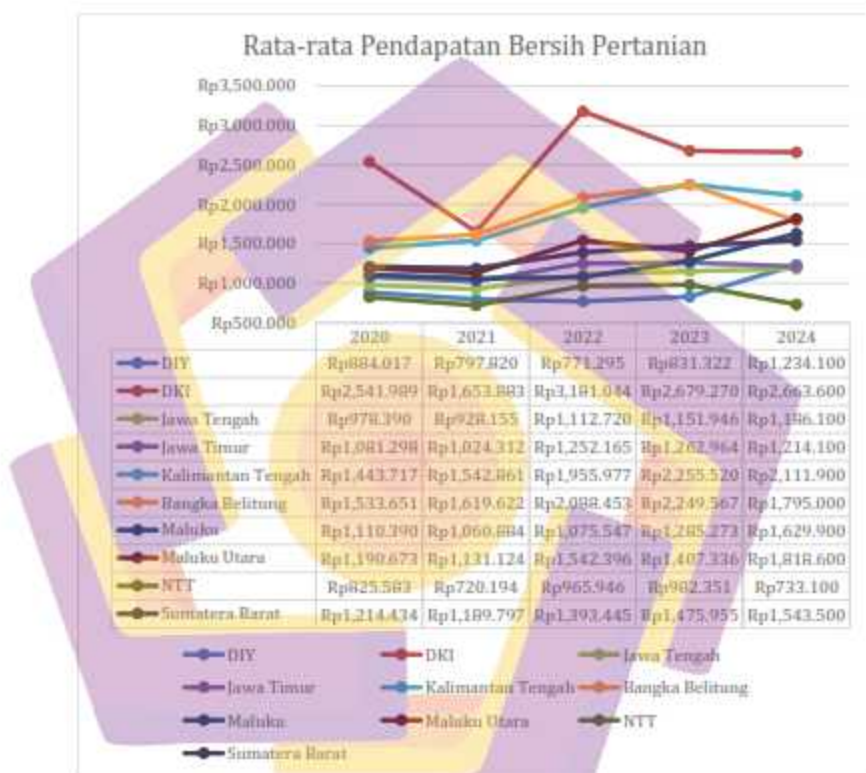


Grafik 1. 2 Indeks Ketahanan Pangan

Sumber: (Badan Pangan Nasional, 2024)

Menurut data Badan Pangan Nasional terlihat bahwa ketahanan pangan provinsi di Pulau Jawa seperti DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur secara konsisten mencatat skor ketahanan pangan tertinggi, dengan DKI Jakarta bahkan mengalami kenaikan pesat dari 77,97 pada tahun 2020 menjadi 85,13 pada tahun 2024. Sebaliknya, provinsi-provinsi di kawasan timur dan kepulauan terpencil mencatat skor ketahanan pangan yang jauh lebih rendah dan stagnan. Kalimantan Tengah bahkan mengalami penurunan dari 72,58 pada 2020 menjadi 70,16 pada 2024, mengindikasikan adanya tekanan

terhadap ketahanan pangan di wilayah tersebut. Kesenjangan skor ketahanan pangan yang terlihat ini secara langsung mencerminkan disparitas kualitas konsumsi pangan antar provinsi yang tergambarkan melalui variabel PPH.



Grafik 1.3 Pendapatan Petani (rupiah)

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2025)

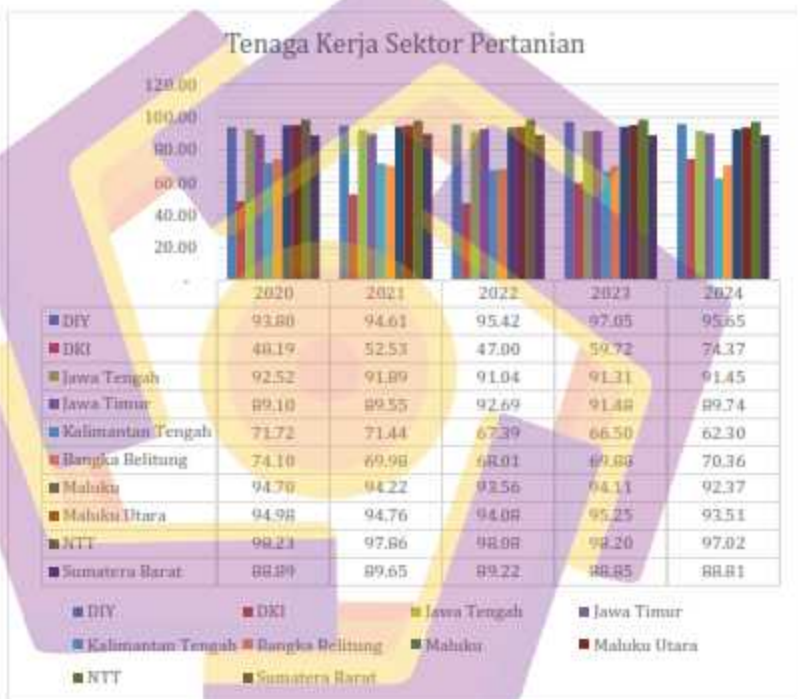
Pada sisi kesejahteraan petani, dilihat dari pendapatan bersih pertanian tercatat pendapatan Jakarta menjadi yang tertinggi dengan lonjakan drastis dari Rp2.541,989 ribu pada 2020 menjadi Rp3.181,044 ribu pada 2022. Kepulauan Bangka Belitung juga menunjukkan pendapatan bersih pertanian yang relatif

tinggi, masing-masing mencapai Rp1.533.651 ribu pada 2020 dan Rp1.795.000 ribu pada 2024, mengindikasikan bahwa sektor perkebunan yang mendominasi wilayah tersebut memberikan nilai hasil yang lebih besar bagi petani. Sebaliknya, NTT secara konsisten mencatat pendapatan bersih pertanian terendah di antara seluruh provinsi sampel, bahkan mengalami penurunan dari Rp825,583 ribu pada 2020 menjadi hanya Rp733,100 ribu pada 2024 sebuah kondisi yang memprihatinkan mengingat sebagian besar penduduk NTT bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber penghidupan utama.

Fluktuasi dan kesenjangan pendapatan bersih pertanian ini memiliki keterkaitan dengan variabel Nilai Tukar Petani (NTP), karena NTP merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani, yang secara langsung mencerminkan daya beli dan kesejahteraan petani. Ketika pendapatan bersih pertanian rendah dan tertekan mengindikasikan bahwa harga yang diterima petani tidak mampu mengimbangi kenaikan biaya produksi dan kebutuhan hidup yang harus dibayar, dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan PDRB per kapita daerah.

Selanjutnya ada SDG-8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*), yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja produktif, serta pekerjaan layak. Pertumbuhan ekonomi yang stabil menjadi syarat utama untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus memperluas akses pangan masyarakat. Di sisi lain, dalam

variabel tenaga kerja informal sektor pertanian yang digunakan dalam penelitian ini, dominasi tenaga kerja informal di sektor pertanian merupakan faktor struktural yang melemahkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan karena para pekerja informal tidak memiliki jaminan sosial maupun pendapatan tetap.



Grafik 1. 4 Tenaga Kerja Sektor Pertanian (Persen)

Sumber: BPS, 2024

Tingginya angka tenaga kerja informal di sektor pertanian menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian. Data diatas terlihat bahwa NTT memiliki nilai yang tinggi, pada tahun 2020 tercatat sebesar 98,23% pekerja informal sektor pertanian dan relatif menurun tahun 2024 hingga nilainya

sebesar 97,02%. Tenaga kerja informal sektor pertanian terendah adalah provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 nilainya 48,19% namun pada tahun 2024 terjadi peningkatan mencapai nilai 74,37%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Jakarta semakin didominasi oleh kelompok mandiri yang tidak terikat perusahaan formal. Pada penelitian (Juanda, 2022) Tenaga kerja informal berpengaruh signifikan terhadap PDRB sektor pertanian dan tingginya proporsi tenaga kerja informal menandakan produktivitas rendah yang menekan PDRB per kapita.

Ketahanan pangan juga keterkaitan erat dengan SDG-1 Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*) yang bertujuan untuk menghapus kemiskinan ekstrem dalam segala bentuknya, tidak hanya dari sisi pendapatan, tapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial (United Nations, 2022). Kemiskinan memiliki relasi timbal balik yang kuat, populasi miskin mengalokasikan porsi terbesar pendapatannya untuk membeli pangan, sehingga fluktuasi harga pangan secara langsung memperburuk kerentanan ekonomi mereka (World Bank, 2022).



Grafik 1. 5 Garis Kemiskinan (rupiah)

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2026)

Data tersebut merupakan data garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Dapat dilihat dengan jelas dari data diatas, seluruh provinsi mengalami kenaikan garis kemiskinan yang signifikan, namun Jawa Tengah mencatat

garis kemiskinan terendah tiap tahunnya dari tahun 2020 sebesar Rp 404.450 dan tahun 2024 sebesar Rp 532.910. Sedangkan tahun 2020, Bangka Belitung mencatat garis kemiskinan tertinggi sebesar Rp 716.460 jauh diatas provinsi lainnya. Kemiskinan menjadi variabel kunci yang memengaruhi aksesibilitas pangan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Penelitian Roseline dan Maimunah (2022) yang menunjukkan bahwa PDRB per kapita memiliki pengaruh signifikan dalam menekan kemiskinan.

Selain relevan dengan SDGs, dinamika ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat yang dibahas dalam penelitian ini juga memiliki hubungan dengan paradigma ekonomi hijau (*Green Economy*), yang semakin penting dalam kebijakan pembangunan global. *Green Economy* menurut prinsip UNEP diantaranya ialah, a).mengakui nilai dari dan investasi pada sumber daya alam, b).meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan energi, c).mendorong pola hidup yang rendah emisi dan berkelanjutan, d).mengalihkan penggunaan bahan bakar fosil ke energi terbarukan dan rendah emisi, e).bertumbuh lebih cepat sembari melestarikan sumber daya alam, f).mengurangi kemiskinan, g).meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesetaraan sosial (UNEP, 2021). Mengadopsi ekonomi hijau yang berkelanjutan memiliki keuntungan ekonomi dalam jangka panjang selain meningkatkan stabilitas lingkungan dalam jangka panjang (Nurhadi, 2023).

Penelitian mengenai ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Sinaga (2022) menemukan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap skor Pola Pangan Harapan,

yang menunjukkan bahwa kualitas konsumsi pangan sangat dipengaruhi oleh kapasitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, Achmad (2022) menemukan bahwa nilai tukar petani berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, yang mengindikasikan bahwa kesejahteraan petani memiliki peran penting dalam stabilitas ekonomi wilayah. Pada sisi lain, (Juanda, 2022) menyatakan bahwa tenaga kerja informal di sektor pertanian berpengaruh terhadap PDRB sektor pertanian dan mencerminkan rendahnya produktivitas yang dapat menekan PDRB per kapita. Menurut Syarifuddin (2024) pertumbuhan ekonomi tidak selalu langsung menurunkan jumlah penduduk miskin tanpa intervensi kebijakan yang tepat. Hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa masing-masing variabel telah diteliti secara terpisah, namun belum banyak penelitian yang menggabungkannya secara simultan dalam satu model untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap PDRB per kapita sebagai proksi stabilitas ekonomi.

Meskipun studi mengenai ketahanan pangan telah cukup berkembang di Indonesia, sebagian besar penelitian yang ada menjadikan ketahanan pangan sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Hanya sedikit penelitian yang secara khusus mengeksplorasi bagaimana indikator-indikator ketahanan pangan seperti pola pangan harapan, nilai tukar petani, tenaga kerja informal sektor pertanian, dan kemiskinan secara bersama-sama memengaruhi PDRB per kapita sebagai cerminan kesejahteraan masyarakat. Serta pemilihan kombinasi provinsi yaitu DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan Sumatera Barat yang

mencerminkan ketahanan pangan. Seperti dari yang tertinggi yaitu DIY, dan DKI Jakarta hingga yang terendah seperti NTT, dan Maluku, sekaligus mencakup kategori menengah. Kesenjangan penelitian tersebut menjadi dasar penting dilakukannya studi ini sebagai gambaran yang lebih mengenai keterkaitan antara ketahanan pangan dengan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan representasi ketahanan pangan, Provinsi DI Yogyakarta dan DKI Jakarta sebagai wilayah perkotaan dengan akses pangan dan infrastruktur ekonomi yang kuat mewakili kelompok dengan ketahanan pangan tertinggi. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah dengan basis pertanian juga mewakili ketahanan pangan tinggi, kemudian Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dan dengan basis ekonomi antara pertanian, Perkebunan, dan sektor lainnya, serta NTT, Maluku, dan Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan terpencil dengan ketergantungan tinggi pada pertanian namun keterbatasan akses dan infrastruktur, mewakili kelompok ketahanan pangan rendah.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, terdapat urgensi akademis untuk menganalisis secara mendalam bagaimana indikator-indikator ketahanan pangan memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Indonesia memiliki upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan menjadi salah satu sektor penting dan strategis dalam mewujudkannya. Badan Pangan Nasional menyebutkan, upaya mewujudkan stabilitas ketahanan pangan tidak lepas dari aspek peningkatan kualitas konsumsi masyarakat, untuk itu NFA terus melakukan berbagai upaya antara lain mengencangkan

bantuan pangan, sosialisasi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) ke anak sekolah, ibu-ibu, dan komunitas. Dengan begitu, penelitian ini diperkuat oleh tujuan SDGs ke dua yaitu *Zero Hunger* untuk mengakhiri kelaparan, memperbaiki status gizi masyarakat, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan dan inklusif (*Food and Agriculture Organization, 2023*).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana indikator-indikator ketahanan pangan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di 10 provinsi sampel, dengan menggunakan data panel dengan periode 2020-2024. Penelitian ini mengkaji pengaruh pola pangan harapan, nilai tukar petani, tenaga kerja informal sektor pertanian, dan kemiskinan terhadap PDRB per kapita sebagai proksi kesejahteraan masyarakat. Pemahaman komprehensif atas hubungan antar variabel ini diharapkan mampu memberikan landasan empiris bagi perumusan kebijakan ketahanan pangan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata, sejalan dengan target SDGs dan Ekonomi Hijau.

1.2. Rumusan Masalah

Indonesia merupakan negara agraris penghasil produk pangan terbanyak di kawasan Asia Tenggara, dengan kontribusi sektor pertanian yang mencapai 13,7% terhadap PDB nasional pada tahun 2023. Namun, pertumbuhan ekonomi yang stabil belum berhasil menggeser pola konsumsi masyarakat menuju asupan yang lebih bergizi dan beragam, yang mengindikasikan bahwa stabilitas ekonomi masih menyisakan persoalan

struktural yang mendalam pada sektor-sektor penyangga kehidupan masyarakat luas, seperti ketahanan pangan rumah tangga dan daya saing petani.

Kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar provinsi di Indonesia yang masih sangat lebar disertai rendahnya kualitas konsumsi pangan, melemahnya daya beli petani dengan nilai tukar petani, tingginya tenaga kerja informal sektor pertanian, serta tingginya kemiskinan khususnya di wilayah timur, mengindikasikan bahwa ketahanan pangan merupakan determinan penting yang belum sepenuhnya dipahami dalam kerangka stabilitas ekonomi regional. Kegagalan dalam mewujudkan ketahanan pangan bukan hanya mengancam status gizi masyarakat, tetapi juga berimplikasi langsung pada stagnasi pendapatan, peningkatan angka kemiskinan, dan destabilisasi ekonomi suatu wilayah.

Kegagalan ini tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga struktural yang saling berkaitan antara sistem pangan, pasar kerja, dan kapasitas daya beli masyarakat, yang kemudian diperburuk oleh pandemi Covid-19 pada tahun 2020 - 2022 yang menekan produksi pangan hingga 5-10% di provinsi rentan seperti NTT dan Maluku. Selain itu juga terdapat konflik geopolitik yang mengganggu produksi, perdagangan, dan harga pangan global sehingga menurunkan ketersediaan dan akses, terutama di negara dengan penduduk miskin yang tinggi. Dampak terparah dirasakan kelompok rentan yang

menghadapi lonjakan harga, penurunan kualitas pangan, dan risiko kerawanan pangan.

Analisis data sekunder BPS tahun 2020 – 2024 pada 10 provinsi dengan karakteristik heterogen seperti Yogyakarta, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Kepulauan Riau menunjukkan ketimpangan yang ekstrem. Pada provinsi urban seperti DKI Jakarta memiliki pendapatan perkapita lebih dari Rp 150 juta per tahun, sementara NTT kurang dari Rp 20 juta, dengan ketergantungan pangan impor mencapai 30% di wilayah timur. Ketimpangan ini menghambat pencapaian SDGs 2 dan SDGs 8 dimana sektor pertanian gagal menjadi penggerak inklusif karena dominasi tenaga kerja informal dan kemiskinan struktural.

Oleh karena itu, diperlukan analisis empiris yang menyeluruh untuk mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel ketahanan pangan terhadap PDRB per kapita sebagai proxy kesejahteraan masyarakat di 10 provinsi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak faktor ketahanan pangan terhadap kesejahteraan masyarakat regional di Indonesia. Berdasarkan dengan keseluruhan permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Apakah Kualitas Konsumsi Pangan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat provinsi di Indonesia?

2. Apakah Kesejahteraan Petani berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat provinsi di Indonesia?
3. Apakah Struktur Tenaga Kerja Pertanian berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat provinsi di Indonesia?
4. Apakah Kemiskinan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat provinsi di Indonesia?
5. Apakah kualitas konsumsi pangan, kesejahteraan petani, struktur tenaga kerja pertanian dan kemiskinan berpengaruh secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat provinsi di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, terdapat tujuan penelitian, yaitu:

1. Menganalisis pengaruh Kualitas Konsumsi Pangan terhadap kesejahteraan masyarakat provinsi di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh Kesejahteraan Petani terhadap kesejahteraan masyarakat provinsi di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh Struktur Tenaga Kerja Pertanian terhadap kesejahteraan masyarakat provinsi di Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh Kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat provinsi di Indonesia?
5. Menganalisis pengaruh kualitas konsumsi pangan, kesejahteraan petani, struktur tenaga kerja pertanian dan kemiskinan secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat provinsi di Indonesia

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada berbagai pihak. Adapun beberapa manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana penulis untuk mengimplementasikan pemahaman, teori-teori dan wawasan yang telah dipelajari selama masa perkuliahan. Penulis dapat memperdalam pemahaman mengenai mekanisme data panel dalam menganalisis penelitian ini. Selain itu, proses penelitian ini berfungsi untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, analisis data, serta keterampilan dalam menyusun karya ilmiah yang terstruktur dan berbasis data empiris.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi mengenai investasi pada gizi keluarga merupakan fondasi utama dalam meningkatkan produktivitas dan memutus rantai kemiskinan. Selain itu, bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal pertanian, penelitian ini berupaya menyuarkan urgensi perlindungan ekonomi terhadap kerentanan guncangan harga pangan.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori dan penelitian di bidang ekonomi pangan dan kesejahteraan masyarakat wilayah di Indonesia. Dengan menggunakan data panel dan metode analisis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya

atau sebagai studi pembandingan untuk pengembangan model penelitian yang lebih kompleks.

4. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang bijak untuk meningkatkan ketahanan pangan sebagai kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi efektivitas program-program yang berjalan.

1.5.Sistematika Bab

Sebagai gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai alur penulisan penelitian ini, berikut diuraikan sistematika penulisan yang mencakup organisasi setiap bab dan subbab dari mulai bab I hingga bab V sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai dasar pelaksanaan penelitian dan sebagai landasan argumentatif yang membangun konteks, urgensi dan arah penelitian. Bab ini terdiri dari lima subbab, seperti latar belakang sebagai uraian topik, rumusan masalah sebagai fokus penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian sebagai uraian kontribusi teoritis dan praktis penelitian, serta dilengkapi dengan sistematika penulisan sebagai uraian sistematika penulisan skripsi agar pembaca dapat memahami struktur penelitian dengan mudah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan fondasi teoritis dan empiris penelitian yang mencakup empat subbab utama yaitu landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Bagian ini disusun berdasarkan dari hasil studi literatur ilmiah seperti buku, jurnal, dan laporan penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian dan menjadi landasan teori ilmiah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan seluruh metode yang digunakan dalam penelitian secara rinci, terdiri dari lima subbab yaitu objek penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, model analisis data, serta metode analisis penelitian. Bagian bab ini disusun sebagai penjelasan gambaran sistematis mengenai langkah-langkah analisis yang diambil selama penelitian sehingga dapat dipahami oleh pembaca.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari keseluruhan penelitian, terdiri dari lima subbab yang tersusun secara progresif yaitu hasil regresi model, pemilihan model regresi, analisis regresi data panel, uji asumsi klasik dan pembahasan. Bagian ini menjelaskan analisis secara mendalam untuk mengintegrasikan temuan kuantitatif penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian, menyajikan jawaban langsung atas setiap rumusan masalah berdasarkan bukti statistik yang diperoleh dari estimasi model. Bagian ini juga terdapat saran dan

masukan yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, serta saran akademis yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajian ini melalui perluasan cakupan data, penambahan variabel, atau penggunaan metode analisis yang lainnya bagi penelitian lanjutan.

